

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Kawasan Hutan TWA *Holiday Resort* pada awalnya termasuk hutan produksi. Sebagian dari kawasan tersebut telah dikonversi menjadi areal perkebunan. Untuk menyelamatkan sebagiannya lagi, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 695/Kpts-II/1990 yang menetapkan peralihan fungsinya menjadi TWA (*Holiday Resort*). Kondisi kawasan TWA *Holiday Resort* sekarang ini sangat memprihatinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan TWA *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan untuk menyusun Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan TWA *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan penelitian lapangan di TWA Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perambahan hutan kawasan TWA tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat bahkan ada yang mendirikan bangunan SD dan SMP swasta, kantor kepala desa serta bangunan lain. Konsep penyelesaian perambahan kawasan TWA *Holiday Resort* dimasa datang adalah melakukan pembaharuan hukum dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d, pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, Selain melakukan pembaharuan hukum, yang perlu di perbaiki misalnya seperti penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan TWA dapat lebih efektif.

Kata kunci: Perambahan hutan; Taman wisata alam; Penegakan hukum

ABSTRACT

The rising population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land is not increased. The most accessible target is forest area. This is what opens up opportunities for forest encroachment. The TWA Holiday Resort Forest area initially includes production forests. Part of the area has been converted into plantation area. To save some of it again, the Minister of Forestry issued Decree No. 695 / Kpts-II / 1990 which establishes its transition function to TWA (Holiday Resort). The condition of TWA Holiday Resort area is now very worrying. The purpose of this study is to examine, analyze the implementation of forest protection principles in the case of the TWA Holiday Resort Expansion Area in Labuhan Batu Selatan Regency and to mnyusun Concept of Settlement of TWA Holiday Resort in Labuhan Batu Selatan Regency. The type of research used is empirical juridical consisting of primary data and secondary data. Primary data was conducted with field research at TWA Labuhan Batu Selatan. The result of the research shows that Implementation of forest protection in Labuhan Batu Selatan Regency has not run well because of the lack of firmness of local government apparatus and law enforcement officers in overcoming the encroachment of TWA forest area, so there are still many activities of encroachment done by society even there which established private elementary and junior high schools, village head offices and other buildings. The concept of completing the encroachment of TWA Holiday Resort in the future is to renew the law by improving Law No. 41 of 1999 on forestry, because in article 78 of the Forestry Law the criminal offense starts from letter d, article 78 a, b, and c not mentioned sanctions, In addition to legal reforms, which need to be improved such as law enforcers, the parties that form and apply the law must be good, facilities or facilities that support law enforcement must also be good, the community or the environment in which the law is applied must support, this is so that efforts in tackling the encroachment of TWA area can be more effective.

Keywords: *Forest encroachment; Nature tourism park; Law enforcement*